

Efektivitas Pengelolaan Administrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K)

Suleman Mahabu

Pascasarjana STIA Bina Taruna Gorontalo

suleman16hamabu@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Bagaimanakah Efektivitas Pengelolaan Administrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato; Faktor-faktor apa saja yang menghambat Efektivitas Pengelolaan Administrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer melalui wawancara dengan para pejabat pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato, dimana wawancara dilakukan dari Mei 2016 hingga Agustus 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Administrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato belum terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan adanya hambatan yang umumnya berasal dari pegawai karena pendidikan, keterampilan dan fasilitas yang minim tersedia dalam melaksanakan pekejaan. Disarankan kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato untuk meningkatkan sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana agar pelayanan yang diberikan oleh pegawai dapat memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: **Efektivitas, Pengelolaan, Administrasi**

ABSTRACT

The aim of this research is to find out: How effective is administrative management in improving services at the Pohuwato Regency Agriculture, Fisheries and Forestry Extension Agency (BP4K); What factors hinder the effectiveness of administrative management in improving services at the Pohuwato Regency Agriculture, Fisheries and Forestry Extension Agency (BP4K). In this research, researchers used primary data through interviews with officials at the Pohuwato Regency Agricultural, Fishery and Forestry Extension Implementing Agency (BP4K), where interviews were conducted from May 2016 to August 2016. The results of this research show that the effectiveness of administrative management in improving services at the implementing agency Pohuwato Regency Agriculture, Fisheries and Forestry Extension (BP4K) has not been implemented well. This is shown by the existence of obstacles which generally come from employees due to minimal education, skills and facilities available in carrying out work. It is recommended to the Implementing Agency for Agriculture, Fisheries and Forestry Extension (BP4K) of

Pohuwato Regency to increase human resources and infrastructure so that the services provided by employees can satisfy interested parties.

Keywords: Effectiveness, Management, Administration

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam diktum pertimbangan dijelaskan: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan; c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya pada pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kemudian pada pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Serta pada pasal 1 ayat (8) yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Hadjon, 2015).

Adapun tujuan Administrasi Pemerintahan menurut (Ujang Charda, 2012), sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 3 undang-undang tersebut adalah untuk:

a. menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan; b. menciptakan kepastian hukum; c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; d. menjamin akuntabilitas badan dan / atau pejabat pemerintahan; e. memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan; f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Sementara Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) meliputi semua aktivitas: a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif; b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif; c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Sementara pada pasal 4 ayat (2) Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administrative (Utama, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa keadministrasian merupakan hal penting dan mempunyai jangkauan yang amat luas yaitu bahwa keadministrasian mempunyai peranan sebagai pusat ingatan, sumber informasi serta sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka melaksanakan segala kegiatannya baik pada kantor-kantor lembaga negara maupun swasta. Dimana dalam proses penyajian informasi agar pimpinan dapat membuat keputusan dan merencanakan kebijakan, maka harus ada sistem dan prosedur kerja yang baik di bidang keadministrasian. Dan suatu lembaga, baik itu lembaga negara maupun swasta tidak akan sanggup memberikan data informasi yang baik, lengkap dan akurat, apabila lembaga tersebut tidak memiliki manajemen keadministrasian yang baik dan teratur. Menurut (Nuraida & SE, 2008) Administrasi akan dapat dikelola dengan efektif apabila dikerjakan dengan baik dan benar oleh para pegawai yang ditugaskan melaksanakan pekerjaan keadministrasian dimana mereka harus memiliki kompetensi atau *skill* yang diperoleh melalui suatu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh

lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai keadministrasian.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato adalah salah satu lembaga negara sehingga merupakan suatu kewajiban bagi pegawai yang ada dalam organisasi ini untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut (Mukuan, 2015), agar pelayanan keadministrasian publik dapat ditingkatkan kualitasnya dimana dalam pemerintahan saat ini lebih menekankan pentingnya “*Good Governance*” melalui suatu sistem pengelolaan keadministrasian, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas instansi. Pemahaman terhadap efektivitas dari perspektif keuangan, pengguna jasa, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato akan memberikan arah dalam melakukan perbaikan guna menciptakan program kegiatan di bidang administrasi yang lebih baik, untuk memberikan arah kebijakan perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola dan melestarikan administrasi yang diserahkan oleh masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), memberikan pelayanan keadministrasian dan melakukan pembinaan tata keadministrasian kepada seluruh SKPD yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato sudah memiliki sumber daya manusia pengelola keadministrasian yang terdiri dari fungsional administrasi dan petugas pengelola keadministrasian.

Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato terdapat beberapa isu aktual di bidang keadministrasian yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keadministrasian menurut (Kiswandi, 2009) antara lain yaitu, *Pertama*, belum optimalnya pengelolaan keadministrasian, ini dapat dilihat pada pelayanan keadministrasian yang sering tidak dapat memberikan pelayanan dalam ketersediaan data yang lengkap bila dibutuhkan. *Kedua*, Belum teraturnya pengelolaan data dan administrasi, disebabkan belum memiliki ruang depo administrasi yang memadai untuk menyimpan administrasi *in-aktive* dari seluruh SKPD yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Pohuwato. *Ketiga*, Kurang efektifitas dalam pengelolaan keadministrasian, karena setiap bidang kerja melakukan pengadministrasian secara sendiri-sendiri, dan tidak didukung oleh tata

pengelolaan dokumen yang rapi dan teratur, tidak ada peralatan komputer yang khusus mengolah sistem keadministrasian, sehingga dalam pelayanan administrasi membutuhkan waktu yang lama dalam penyajian informasi data.

Di sisi lain, menurut (Riniwati, 2016), kondisi sumber daya manusia (SDM) belum mempunyai kemampuan yang memadai di bidang keadministrasian, rendahnya motivasi kerja karena bagian pekerjaan ini merupakan jenis pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh sebagian besar. Dengan melihat kondisi permasalahan di atas maka obyek penelitian ditekankan pada efektivitas Pengelolaan administrasi pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato, sehingga akan ditemukan solusi agar pengelolaan keadministrasian pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato dapat dilakukan dengan optimal, efektif dan efisien.

Adapun Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Tugas dan Pokok Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K), dimana salah satu tugasnya adalah membantu Kepala Daerah dalam: (a) melakukan pelaksana, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi, partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan; (b) menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional; (c) memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; (d). melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana pendekatan kualitatif menurut (Sarwono, 2010) menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut, mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato selama lebih kurang 2 (dua) bulan yaitu dari Desember 2015 sampai dengan Januari 2016, dimana Permasalahan mengenai efektivitas pengelolaan administrasi dalam meningkatkan

pelayanan berada pada Badan Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan Dan Kehutanan (BP4K).

Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan doukemntasi. Menurut (Sugiyono, 2010) teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam kegiatan observasi ini, pengamatan yang dilakukan bukan sekedar mengamati sesuatu namun pengamatan dalam penelitian harus berada dalam lingkup kegiatan ilmiah. Menurut (Pasolong, 2013) dalam melakukan observasi suatu kegiatan penelitian, ada dua indera yang sangat vital dalam melakukan pengamatan, yaitu telinga dan mata.

Wawancara atau *interview* adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis. Menurut (Pasolong, 2013) wawancara adalah kegiatan tanya jawab dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Metode wawancara dapat dilakukan baik secara langsung (*personal interview*) maupun tidak langsung (*telephone* atau *mail interview*). Wawancara secara langsung merupakan pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) terhadap responden atau informan untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Suyanto & others, 2015). Dalam penelitian ini juga penulis memanfaatkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku bacaan, artikel di *internet* dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengelolaan Administrasi

Efektivitas Pengelolaan Administrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato dapat terlaksana dengan baik apabila dilakukan hal-hal berikut:

Kuantitas

Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan di bawah kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang didapat atau dialaminya selama bekerja (Utomo Putri, 2015). Setiap orgnisasi selalu berusaha supaya efektifitas kerja dari karyawannya dapat ditingkatkan. Oleh Karena itu, suatu organisasi selalu berusaha agar setiap karyawannya memiliki

moral kerja yang tinggi. Demikian pula dapat dilihat bagaimana efektivitas Pengelolaan Administrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan bekerja dengan intensitas yang lebih besar dimana tujuan utama adalah kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara menuju Indonesia yang lebih baik.

Kualitas

Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh karyawan berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan di dalam mengerjakan pekerjaan (Utomo Putri, 2015). Hal demikian menjadi suatu petunjuk bahwa kualitas dalam pengelolaan Administrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato menjadi perhatian agar pelayanan administrasi dapat terlaksana dengan baik.

Informan kunci mengatakan bahwa para pegawai memang diberi beban pekerjaan lebih besar dan banyak tetapi juga berkualitas agar pelayanan administrasi penyuluhan pertanian dan kehutanan menjadi lebih efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut di atas menunjukkan bahwa pegawai badan pelaksana penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan bekerja dengan intensitas yang lebih besar juga harus berkualitas dimana tujuan utama adalah kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara menuju Indonesia yang lebih baik.

Waktu

Waktu dalam melakukan suatu pekerjaan harus dapat digunakan sebaik-baiknya oleh pegawai, terutama dengan cara datang tepat waktu ke kantor dan berusaha untuk menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dengan memanfaatkan waktu selama penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan (Ibrahim & Meilany, 2015). Efektivitas Pengelolaan Administrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato merupakan hal yang penting ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut di atas menunjukkan bahwa pegawai badan pelaksana penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan bekerja dengan intensitas yang lebih besar, berkualitas dan

memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dimana tujuan utama adalah kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara menuju Indonesia yang lebih baik.

Faktor Penghambat Efektivitas Pengelolaan Administrasi

Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato dapat terhambat manakala terjadi hal-hal berikut:

Pendidikan

Pendidikan bagi seseorang yang mengelola suatu administrasi dalam rangka pelayanan menjadi hal seharusnya dipertimbangkan, karena tanpa pendidikan yang cukup maka pengelola administrasi akan mengalami kesulitan. Pendidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan formal minimal lulusan sekolah menengah lanjutan atas (SLTA) atau sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK). Khususnya SMK atau SMEA dahulu siswa yang memilih jurusan administrasi perkantoran tentu lebih mengerti bagaimana mengelola administrasi. Hal ini perlu menjadi syarat utama pegawai dalam Pengelolaan Administrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato.

Para informan ini para pegawai memang diberi beban pekerjaan lebih banyak, bermutu, menggunakan waktu sebaik mungkin dan terutama harus memiliki pendidikan minimal sekolah menengah atau sekolah kejuruan bidang administrasi karena mereka telah terlatih untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi perkantoran terutama menggunakan perangkat komputer baik microsoft word, power point maupun microsoft excell dengan hasil yang memuaskan yang menyebabkan pelayanan administrasi menjadi lebih efektif.

Keterampilan

Keterampilan dalam mengelola administrasi dibutuhkan agar pengelolanya mampu memberikan pelayanan terbaik kepada siapa saja yang memerlukan. Yang dimaksud terampil adalah mampu menggunakan suatu perangkat teknologi seperti komputer dengan berbagai menu di dalamnya. Karena perangkat baik komputer maupun laptop sudah menjadi alat bantu menyelesaikan pekerjaan administrasi. Orang yang terampil sudah tentu dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat dan tepat serta akurat. Pengelolaan Administrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato akan menjadi efektif apabila dikelola oleh pegawai yang memiliki keterampilan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa pegawai badan pelaksana penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan bekerja seharusnya mempunyai keahlian atau keterampilan di bidang komputer karena sangat bermanfaat dalam meringankan pekerjaan administrasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Fasilitas

Dalam mengerjakan atau melakukan suatu tugas atau pekerjaan, sebuah fasilitas akan sangat membantu menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan dengan lebih mudah dan cepat. Sebagai contoh adalah komputer akan sangat membantu suatu pekerjaan administrasi seperti membuat konsep surat dengan format tertentu sesuai kehendak kita sendiri. Komputer dengan berbagai menu yang disediakan telah membuat terobosan baru dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dahulu dikerjakan secara manual. Keefektifan Pengelolaan Administrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato agar berlangsung secara cepat, tepat dan akurat apabila ditunjang oleh fasilitas yang cukup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan kantor akan membuat pegawai badan pelaksana penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan bekerja dengan cepat dalam melayani pihak-pihak yang membutuhkan data dimana tujuan utama adalah kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara menuju Indonesia yang lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pengelolaan Administrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato bahwa kuantitas, kualitas dan waktu dalam melaksanakan suatu pekerjaan menjadi dasar atau patokan agar efektivitas pengelolaan administrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan pada suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak-pihak yang mengelola dan pimpinan.

Pendidikan, keterampilan dan fasilitas yang dimiliki oleh pegawai merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian dalam pihak pimpinan organisasi pemerintah juga swasta yang akan merekrut atau menempatkan pada tempat yang sesuai dengan latar belakang baik pendidikan formal maupun pendidikan informal.

Diharapkan para pimpinan baik organisasi pemerintah maupun swasta dalam menempatkan seseorang harus sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Apabila pendidikan formal telah memenuhi syarat, maka perlu diberikan pendidikan informal seperti pelatihan yang akan berguna dalam melaksanakan pekerjaan dimana mereka ditempatkan. Dan pendidikan perlu diberikan agar terhindar dari kecemburuan sosial dalam komunitas kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, P. M. (2015). *Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 4(1), 51–64.
- Ibrahim, M., & Meilany, P. (2015). *Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan (kasus bagian operasional PT. Indah Logistik Cargo cabang Pekanbaru)*. Riau University.
- Kiswandi, R. (2009). *Analisis Kinerja Pengelolaan Bagian Kearsipan pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Mukuan, C. (2015). *Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur*. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 2(6), 1121.
- Nuraida, R. I., & SE, M. M. (2008). *Manajemen Perkantoran*. PT Kanisius.
- Pasolong, D. H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Riniwati, H. (2016). *Manajemen sumberdaya manusia: Aktivitas utama dan pengembangan SDM*. Universitas Brawijaya Press.
- Sarwono, J. (2010). *Pintar menulis karangan ilmiah-kunci sukses dalam menulis ilmiah*. Penerbit Andi.
- Sugiyono, S. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Suyanto, B., & others. (2015). *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Prenada Media.
- Ujang Charda, S. (2012). *Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Wawasan Hukum, 27(02), 588.
- Utama, J. (2014). *Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Sang Media.
- Utomo Putri, D. E. (2015). *Hubungan Pemberian Kompensasi Terhadap Kualitas Kerja Karyawan PT. Titian Bahtera Segara*. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan